



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 1488/BD.07.02/P.01/B/10/2021

5 Oktober 2021

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Penawaran Program Pelatihan Bahasa Inggris
In-Country English Language Training (IC-ELT) Tahun 2022

Yth.:

1. **Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;**
 2. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia;**
 3. **Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- (Daftar terlampir)

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Manaaki New Zealand Scholarship membuka kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau PNS atau Non-Governmental Organization (NGO) yang bekerja dalam sektor prioritas untuk mengikuti Program Pelatihan Bahasa Inggris yang dikelola Manaaki New Zealand Scholarship.

Program IC-ELT Tahun 2022 merupakan program pelatihan bahasa Inggris yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris terutama untuk meningkatkan keterikatan dengan Pemerintah Selandia Baru dengan menyediakan pengajar yang kompeten dari Selandia Baru. Program IC-ELT Tahun 2022 akan dilaksanakan oleh Indonesia Australia Language Foundation (IALF) di kampus Bali, Indonesia, pada bulan Januari hingga April 2022.

Calon peserta **diharuskan mendaftar secara *online* melalui** situs <https://link.bappenas.go.id/IC-ELT-Bappenas-2022> (pilih Denpasar, Bali) dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas **paling lambat tanggal 24 Oktober 2021. Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (*email*) tidak kami proses lebih lanjut.**

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi Yanti Silviana dan Mike Anggraini melalui email berikut yanti.silviana@mfat.net dan mike.ingriani@mfat.net, atau menghubungi kami melalui

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Tim Penyelenggaraan Pelatihan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
6. PPK Program PPN X Kementerian PPN/Bappenas

Yth.:

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
26. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
27. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
28. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
29. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
30. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
32. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
33. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
34. Kejaksaan Agung

35. Kementerian Agama
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
38. Kementerian Dalam Negeri
39. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
40. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
41. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Kesehatan
44. Kementerian Ketenagakerjaan
45. Kementerian Komunikasi dan Informatika
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
47. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
50. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
51. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52. Kementerian Luar Negeri
53. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
54. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
56. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
57. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
58. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
61. Kementerian Perhubungan
62. Kementerian Perindustrian
63. Kementerian Pertahanan
64. Kementerian Pertanian
65. Kementerian Sekretariat Negara
66. Kementerian Sosial
67. Kepolisian Republik Indonesia
68. Komisi Aparatur Sipil Negara
69. Komisi Pemilihan Umum
70. Komisi Yudisial
71. Mahkamah Agung
72. Mahkamah Konstitusi
73. Ombudsman Republik Indonesia
74. Perpustakaan Nasional

75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Kabinet
77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
78. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
79. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara

- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunung Sitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidimpuan
- 2.30. Kota Pematang Siantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjung Balai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir

- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Kaur
- 7.5. Kabupaten Kepahiang
- 7.6. Kabupaten Lebong
- 7.7. Kabupaten Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir

- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuk Linggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi

- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Karawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus

- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek

- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunungkidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata

- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang

- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso

- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan

- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni

- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong

PROGRAM IC-ELT TAHUN 2022

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal menjadi PNS golongan IIIa 100 persen. **Diutamakan bagi pejabat fungsional perencana semua jenjang;**
3. Non-Governmental Organization yang bekerja dalam sektor prioritas untuk mengikuti Program Pelatihan Bahasa Inggris yang dikelola Manaaki New Zealand Scholarship
4. Usia maksimal setinggi-tingginya ialah 40 tahun per Oktober 2021;
5. Memiliki nilai IELTS kisaran 5,5 hingga 6,5;
6. Memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris;
7. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan nilai IPK minimal 3,0 dari 4,0;
8. Bersedia untuk mengikuti pelatihan secara penuh waktu di Bali dalam kurun Januari hingga April 2022;

Prosedur Pelamaran

1. Peserta diharuskan untuk melakukan proses pendaftaran secara *online* melalui situs <https://link.bappenas.go.id/IC-ELT-Bappenas-2022> **paling lambat tanggal 24 Oktober 2021**
2. Selama proses seleksi hingga proses pelatihan berakhir, Pusbindiklatren Bappenas tidak memungut biaya dari instansi pengirim/peserta pelatihan. Seluruh proses pengumuman dan pemanggilan peserta, sepenuhnya akan dilakukan melalui seluruh media sosial dan website Pusbindiklatren Bappenas.

Jadwal Pelaksanaan

Proses pendaftaran paling lambat hingga tanggal **24 Oktober 2021** dengan periode pelaksanaan pelatihan akan dimulai pada bulan Januari 2022 hingga April 2022.

Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program secara sepihak dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pusindiklatren Bappenas, maka **peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara.**
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika mengundurkan diri setelah mengirimkan surat kesediaan mengikuti pelatihan.